

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kinerja keuangan merupakan faktor terpenting dalam setiap perusahaan yang digunakan untuk melihat pencapaian sebuah perusahaan pada periode tertentu. Kinerja keuangan adalah suatu prestasi kerja yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu yang berisi gambaran tentang baik buruknya kondisi keuangan perusahaan (Sianturi, 2015). Kinerja keuangan mencerminkan bagaimana perusahaan melakukan suatu kegiatan untuk mewujudkan visi misi perusahaan. Penilaian kinerja keuangan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi tentang informasi keuangan dalam sebuah perusahaan pada periode tertentu dan digunakan sebagai gambaran untuk melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dalam laporan keuangan yang menjadi fokus utama dari para pengguna laporan keuangan adalah laba dari perusahaan (Suwardi Bambang Hermanto, 2024). Laba dari perusahaan tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan salah satu alat yang paling tepat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan cara melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Harianto, 2017). Menurut Harianto (2017) Return On Asset (ROA) dapat digunakan sebagai alat pengukur kinerja keuangan perusahaan. Return On Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva perusahaan. Sehingga penelitian ini termotivasi menggunakan Return On Asset (ROA) sebagai indikator kinerja keuangan (Setyawan, 2019).

Kinerja keuangan merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Dalam menjalankan sebuah perusahaan akan lebih efektif jika terdapat pemisahan fungsi antara pemilik dan pengelola. Adanya pemisahan fungsi tersebut memiliki tujuan agar masing-masing fungsi dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga

perusahaan dapat beroperasi dengan lebih baik dan mampu mencapai hasil yang optimal (Makhdalena, 2018). Pemisahan fungsi antara pihak pemilik dengan pengelola cenderung akan menimbulkan konflik. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan para pemegang saham menyebabkan adanya kemungkinan manajer akan bertindak demi mensejahterakan dirinya sendiri dan merugikan para pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan antara pihak pemegang saham (principal) dan pihak manajemen (agent) disebut dengan konflik keagenan. Pihak manajemen dan pemegang saham keduanya merupakan pemaksimum utilitas, sehingga Jensen dan Meckling (1976) memiliki pendapat bahwa ada alasan untuk percaya bahwa pihak manajemen tidak selalu bertindak demi kepentingan pemegang saham (Rahmatin & Kristanti, 2020). Untuk melindungi hak para pemegang saham dan memastikan manajemen akan bertindak demi kepentingan pemegang saham, maka perusahaan membutuhkan sistem pengelolaan perusahaan yang baik dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja terhadap manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham berdasarkan pada kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007).

Penerapan *good corporate governance* di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN, berdasarkan *CG watch Credit Lyoinnaise Securities Asia* (CLSA) Indonesia diperingkat paling rendah dalam kurun waktu 2016 sampai 2020. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk peraturan tentang penerapan tata kelola perusahaan yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 yang mengatur mengenai direksi, dewan komisaris, komisaris independen dan juga OJK dapat memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar peraturan tersebut guna membentuk tata kelola perusahaan yang baik (Rahmatin & Kristanti, 2020). Kurangnya penerapan GCG menyebabkan pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan. Kasus penipuan, penggelapan, pembobolan dan korupsi yang dilakukan oleh oknum bank itu sendiri banyak yang terjadi di Perbankan Indonesia. Penerapan GCG dalam perbankan di

harapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Perusahaan yang menerapkan GCG akan lebih efisien dan daya saing meningkat.

Otoritas jasa keuangan (OJK) mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) oleh perusahaan di Indonesia. Pasalnya, penerapan GCG di Indonesia saat ini relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Ketua dewan komisaris OJK Wimboh Santoso mengungkapkan, hanya ada dua emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar Emiten terbaik dalam praktik GCG di Asean dalam ajang penganugerahan *Asean Corporate Governance Awards* yang diselenggarakan oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF) di Manila, Filipina. Kedua emiten tersebut yaitu PT. Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.(cnnindonesia.com) Dimana dari fenomena diatas menjadi bukti yang menunjukkan pencapaian Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN lainnya, dan penerapan GCG di Indonesia masih belum berjalan dengan baik (Rahardjo & Wuryani, 2021). Hal tersebut terjadi karena adanya *agency conflict* dimana pihak yang diberi wewenang memiliki perbedaan kepentingan dengan pihak yang memberi wewenang (Jensen & Meckling, 1976).

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan *principal* sebagai pelaku utama perusahaan. *Principal* (pemilik) merupakan pihak yang memberikan amanah kepada agen untuk bertidak sesuai dengan keinginannya, sedangkan agen (manajemen) merupakan pihak penerima amanah dari pemilik untuk menjalankan perusahaan. Pemisahan kepemilikan ini didasarkan pada teori agensi (*agency theory*) dimana agen cenderung akan meningkatkan keuntungan pribadinya dari pada tujuan perusahaan. Untuk menghindari akibat buruk dari perilaku oportunisme manajer yang disebabkan karena adanya konflik kepentingan antara pemilik dengan manajemen, maka diperlukan sebuah mekanisme yang dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemilik yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan adanya GCG pada suatu perusahaan, akan menciptakan hubungan yang kondusif antara organ dan struktur tata kelola perusahaan seperti : dewan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham

dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan direksi sebagai organ dan struktur tata kelola perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit, komite pemantau resiko serta komite remunasi dan nominasi, di mana dewan komisaris bersama komite audit mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Implementasi penerapan GCG merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk menarik kepercayaan investor. Semakin serius perusahaan menerapkan GCG maka kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat (Riswanto, 2023)

Kepemilikan Institusional merupakan mekanisme pertama dari *Good Corporate Governance* (Denis & McConnell, 2003). Kepemilikan Institusional dapat menentukan posisi dalam perusahaan dengan melihat dari persentase kepemilikan atas saham perusahaan. Kondisi ini juga dapat menentukan kebijakan *Good Corporate Governance* dan kontrol dalam perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu investor dari institusi lain (Muryati & Suardikha, 2014). Investor institusi akan mengawasi manajemen dari perilaku oportunistik. Semakin tinggi kepemilikan oleh investor institusi akan meningkatkan pengendalian dari pihak eksternal (Annisa et al., 2023). Kepemilikan institusional yaitu satu diantara media yang bisa dipakai untuk meminimalisir agency conflict (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan Institusional mempunyai tingkat pengontrolan yang tinggi pada aktivitas manajemen yang dapat meminimalisir peluang manajemen untuk melakukan kecurangan, kepemilikan institusional dapat memantau perkembangan investasi yang ditanamkan pada perusahaan secara profesional dan bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Elisetiawati & Artinah, 2016). Berdasarkan hasil penelitian (Atmaja et al., 2019) dan (Dwi & Aqamal Haq, 2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Rahardjo & Wuryani, 2021) dan (Aprianingsih, 2020) yang menyatakan

bahwa kepemilikan insitusal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dewan Komisaris Independen merupakan mekanisme kedua dari *Good Corporate Governance*. Peran dari Dewan komisaris independen dalam perusahaan adalah memberikan nasihat dan arahan untuk mengelola perusahaan serta membantu merumuskan strategi perusahaan. Adanya Dewan Komisaris Independen sangat dibutuhkan, karena peran dari komisaris independen adalah memberikan nasihat dan arahan dalam mengelola serta membantu strategi perusahaan. Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh komite yang bertujuan untuk menjalankan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit bertugas dalam melakukan pengawasan internal perusahaan terhadap audit, proses penyusunan laporan keuangan dan mengawasi penerapan GCG (Nusantara et al., 2023). Berdasarkan Hasil penelitian (Rahardjo & Wuryani, 2021) dan (Dwi & Aqamal Haq, 2023) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Aprianingsih, 2020) dan (Y. R. Sari & Setyaningsih, 2023) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Komite Audit merupakan mekanisme ketiga dari *Good Corporate Governance*. Komite audit bertugas dengan komisaris independen dan profesional yang berbentuk dewan komisaris dan berperan dalam memperkuat serta mendukung kinerja komite risiko pada fungsi pengawasan, pelaporan keuangan, pelaksanaan audit serta penerapan dari GCG pada sebuah perusahaan (Puteri, 2023). Komite audit berperan khusus sebagai pembawa dewan pada tugas audit umumnya. Komite audit merupakan badan professional dan independen memiliki tugas dalam memberikan bantuan kepada dewan untuk melakukan pelaporan keuangan dan memantau implementasi *good corporate governance* (Khairunnisa et al., 2022). Berdasarkan Hasil penelitian (Rahardjo & Wuryani, 2021) dan (Aprianingsih, 2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Suwardi Bambang Hermanto, 2024) dan (Y. R.

Sari & Setyaningsih, 2023) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Ukuran Perusahaan dan *Leverage* sebagai variabel kontrol karena sudah terbukti Ukuran Perusahaan dan *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Hasil penelitian (Suwardi Bambang Hermanto, 2024) dan (Nusantara et al., 2023) menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan . Ukuran perusahaan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dari total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Perusahaan – perusahaan besar memiliki akses pasar yang lebih baik daripada perusahaan kecil dan memiliki kegiatan operasional yang lebih besar serta lebih kompleks dalam pengelolaan dananya. Sehingga perusahaan besar memiliki kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar, sehingga ROA akan meningkat diikuti pula dengan meningkatnya kinerja keuangan (Suwardi Bambang Hermanto, 2024). Hasil dari penelitian (Rahmatin & Kristanti, 2020) dan (Suwardi Bambang Hermanto, 2024) menyatakan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban yang berupa beban atas aktiva yang dibiayai oleh utang yang tinggi, dapat menyebabkan biaya modal yang tinggi. Maka *leverage* akan mengurangi jumlah modal sendiri yang akan digunakan untuk membiayai tingkat penggunaan utang yang cukup. Besar kecilnya jumlah utang atas ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan berpengaruh pada besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu untuk meningkatkan laba maka perusahaan tidak perlu meningkatkan profitabilitas dan tidak perlu meningkatkan jumlah utang atas ekuitas, karena besar kecilnya *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Melihat dari fenomena yang terjadi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI, dan melihat berdasarkan penelitian terdahulu yang beragam mengenai peningkatan kinerja keuangan perusahaan dan beberapa kasus yang terjadi pada perusahaan sektor keuangan, maka peneliti tertarik untuk mengambil objek penelitian adalah perusahaan keuangan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan

yang sebelumnya yaitu pada objek penelitian yang difokuskan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan penelitian terdahulu karena hasil yang diperoleh tidak konsisten, serta untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis beberapa variabel yang berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel *good corporate governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”**. Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan masalah pada :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan
2. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja Keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu akuntansi mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam Kinerja Keuangan Perusahaan, terutama dalam konteks variabel *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan *Leverage*.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan perusahaan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi tambahan mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

2. Bagi Eksternal Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan *Leverage*. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi investor maupun calon investor dalam mengambil keputusan jika akan berinvestasi terutama pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2023. Dapat dilihat berdasarkan hasil audit laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh akuntan publik.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memberikan informasi tambahan dan mengkaji beberapa topik yang berkaitan dengan masalah Kinerja Keuangan Perusahaan pada penelitian ini.

1.4 Ruang Lingkup Dan Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pembatasan masalah, yaitu :

1. Objek penelitian adalah perusahaan sektor keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Hanya variabel Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* yang diujikan dalam penelitian ini.
3. Data dalam penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rentan waktu 2023.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdapat lima bab, sistematika penulisan memiliki fungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan skripsi yang dibuat, berikut sistematika penulisannya :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah penelitian terkait dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit ukuran perusahaan, *leverage*, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup atau pembatasan masalah, dan sistematika pelaporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan uraian tentang landasan teori menurut para ahli, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, serta terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan uraian tentang penjelasan variabel penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan uraian tentang pengujian dan analisis dari hasil temuan yang diperoleh selama penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan uraian tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang berguna bagi penelitian di masa yang akan datang.